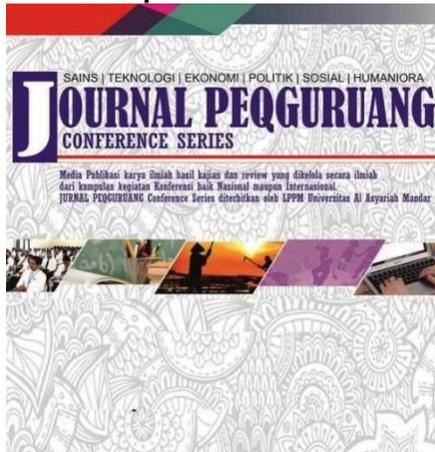


Graphical abstract



ANALISIS KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN TABUNGAN GAS LPG 3 KG DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

^{1*}Zulkifli, ^{2*}Mohammad Arfandi Adnan ^{3*}Agustinus Sudi

¹Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar,

¹Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar.

¹Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

kiplipolman@gmail.com

arfandiadnan1982@gmail.com

Abstract

Supervision is the process of observing the implementation of the organization's activity channels to ensure that all work is carried out according to a predetermined plan. Based on this, the implementation of supervision is intended to avoid the occurrence of irregularities in various activities carried out by members, in this case the Department of Industry and Trade of Polewali Mandar Regency as one of the parties responsible for implementing the government's duties, it is required to supervise the distribution of 3 Kg LPG Gas. Polewali Mandar Regency. This study aims to determine the process of monitoring the distribution of 3 kg LPG at the Department of Industry and Trade of Polewali Mandar Regency. The type of research used is qualitative, namely a form of research that aims to provide a general description as a kind of data collected from the field objectively with descriptive research type. Data collection techniques used are observation, interviews, to a number of informants and dekomendasi. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Department of Industry and Trade in supervising the distribution of 3 kg LPG has not been fully implemented according to the specified plan. This is based on the discovery of several obstacles and various efforts made by the local government of Polewali Mandar Regency which have not been carried out optimally.

Keywords: Analysis, Performance, Department of Industry and Trade

Abstrak

Memantau saluran kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota; Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar dituntut untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar memantau pendistribusian LPG 3 kilogram. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, atau metode penelitian deskriptif yang mencoba memberikan gambaran umum tentang suatu jenis data yang diperoleh dari lapangan secara objektif. Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah observasi, wawancara dengan berbagai informan, dekomendasi, dan observasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pendistribusian LPG 3 kg belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan pada identifikasi berbagai hambatan dan berbagai inisiatif yang dibuat oleh masyarakat setempat

Kata kunci: Analisis, Kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v5i1.3594>

Received : 22 Agustus 2022 | Received in revised form : 6 Januari 2023 | Accepted : 26 Mei 2023

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi pancasila yang menganut demokrasi ekonomi adalah yang dipakai di Indonesia. Ini menyiratkan bahwa semua kegiatan ekonomi adalah mekanisme yang digunakan suatu negara untuk mendistribusikan sumber dayanya kepada warganya dan organisasinya. Cara suatu sistem ekonomi mengendalikan unsur-unsur produksinya sendiri merupakan perbedaan mendasar yang dibuatnya dari sistem ekonomi lainnya. Seorang individu mungkin menjadi pemilik faktor produksi dalam beberapa sistem. Sedangkan di sistem lain, semua faktor tersebut yang bertanggung jawab kepada pemerintah (Arifin, M.Y, 2019).

Pemerintah dipaksa untuk terus berupaya meningkatkan perekonomian di Indonesia sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi negara yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Para tetangga. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beralih dari minyak tanah ke GAS LPG sejak tahun 2007.

Akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah kini memiliki keleluasaan dan keleluasaan untuk membangun pemerintahannya sendiri, mengatur rumahnya sendiri, dan mengatur atau mengatur perekonomiannya untuk kepentingan warga negara. daerah mereka sendiri.

Karena mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sistem ekonomi yang ada di berbagai belahan dunia sangat substansial sifatnya. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh yang diberikan di atas, dan pertimbangkan bagaimana skala kabupaten mempengaruhi pengawasan distribusi ekonomi yang berbeda. Diskusi ini mau tidak mau akan mengarah ke pemerintah. Terkait proses pengawasan yang akan dilakukan, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar No. 890 tahun 2021 pembentukan tim pemantau distribusi bahan bakar minyak dan gas cair 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar.

Sistem penunjang keputusan atau system pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunasikan untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. (Sudi A, 2021).

Polewali Mandar menegaskan bahwa sebagai akibat dari upaya tersebut, akan ada kelangkaan. Apabila harga BBM dan elpiji 3 kg berbeda dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, maka perlu menghubungi pengatur waktu pengawasan untuk memantau dan memodifikasi harga seperti yang dijelaskan di atas. Menyingkatkan

pentingnya kinerja DISPERINDAG dalam mengatur dan mengawasi perekonomian dan hal-hal besar yang menjadi tanggung jawab yang dipikulnya karna lagi menyangkut tentang kehidupan masyarakat sosial, namun demikian yang terjadi.

Sesuai dengan Pergub. No. 19 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tabung gas 3 Kg, dan keputusan Bupati Polewali Mandar No. KPTS/542/56/HUK tentang penyesuaian Harga Eceran Tertinggi tbgung gas LPG 3 Kg tingkat Kabupaten Polewali Mandar.

Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagai diketahui tenaga kerja yang penghasilan barangnya dengan tingkat harga yang terjangkau bagi kehidupan masyarakat sosial dan devisa Negara yang sangat potensial. Dengan industri kecil maupun menengah yang sangat kuat maka struktur ekonomi akan menjadi kokoh, yang sangat berperan besar bagi peningkatan ekspor dan pengendalian infor, serta tumbuh dan berkembang pada basis kemampuan diri. (Suman A,2019).

Tidak bisa dipungkiri, di tingkat merchant dan pelanggan, terkadang mereka yang berwenang menggunakan tabung gas 3 kg mengalami kesulitan. Namun, masih banyak kekhawatiran yang belum terjawab mengenai fenomena ini dan isu tabung gas 3 kg untuk kelas bawah. Didapatkan karena keluarga menengah ke atas, termasuk rumah makan dan UMKN, tetap menggunakan tabung gas 3 kg, seolah-olah karena barang-barang bermasalah tersebut di atas tidak tepat sasaran dan dapat menimbulkan kelangkaan. Oleh karena itu, penulis direkomendasikan untuk melakukan studi tentang "Analisis Kinerja". Disperindag di Kabupaten Polewali Mandar Mengawasi Tabung Gas 3 Kg.

Pengertian Pengawasan

Berikut pengertian dari pengawasan menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut (Handoko, 2016: 25) Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kedua-duanya.

Dari kutipan di atas memberikan pengertian bahwa pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam hal ini DISPERINDAG Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan. kg di Kabupaten Polewali Mandar.

Mendefinisikan supervisi sebagai setiap tindakan bisnis yang berusaha untuk mempelajari dan mengevaluasi keadaan sebenarnya di sekitar pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk menentukan apakah mereka cocok atau tidak. Menetapkan standar kinerja dan mengambil tindakan yang tepat untuk membantu pencapaian hasil yang diantisipasi sejalan dengan kinerja yang telah ditetapkan adalah proses pengawasan.

Menurut Kurniawan Sujatmo (Arifin. M.Y, 2019) mendefinisikan supervisi sebagai setiap tindakan bisnis yang berusaha mempelajari dan mengevaluasi keadaan sebenarnya di sekitar pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk menentukan apakah sesuai atau tidak. Menetapkan standar kinerja dan mengambil tindakan yang tepat untuk membantu mencapai hasil yang diantisipasi sejalan dengan kinerja yang ditetapkan adalah proses pemantauan.

Jenis pengawasan Ada dua macam pengawasan terhadap kegiatan atau usaha, dan jenis pengawasan tersebut sangat erat kaitannya dengan alasan penerapannya.

1. Pengawasan yang konsisten Pemantauan terus menerus dilakukan secara berkala atau pada interval yang telah ditentukan (Contoh: sebulan sekali). Pengamatan atau inspeksi yang cepat.
2. Pemantauan mendadak yang dilakukan tanpa peringatan. Kegiatan atau usaha yang bermasalah harus diawasi atau diperiksa; inspeksi dapat dilakukan sesuai kebutuhan, misalnya, secara tidak terduga dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Kepada orang yang bertanggung jawab atas kegiatan atau bisnis, terlebih dahulu.
4. Cara lain untuk mengkategorikan pengawasan adalah sebagai berikut: apakah dilakukan oleh orang yang mengendalikan kegiatan atau bisnis itu sendiri, atau dilakukan oleh pihak lain, seperti pemerintah atau kelompok non-pemerintah.
5. Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan yaitu, menetapkan standar dan prosedur penilaian kerja, penilaian kinerja, dan melakukan tindakan korektif.
6. Sebuah. Teknik Pengawasan
7. Sebuah manajemen atau pemerintah akan menggunakan pendekatan pengawasan untuk melakukan pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung.
8. Kegiatan yang sedang berlangsung berada di bawah manajemen atau kepemimpinan manajer. Jenis pengawasan tersebut antara lain:
 - a. Inspeksi Langsung
 - b. Laporan dari lokasi

Pengawasan tidak langsung Apakah pelaksanaan pengawasan dilakukan dari jarak jauh melalui laporan yang dapat dilihat dari: sebuah).

- a) Laporan tertulis
- b) Laporan lisan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan bahwa tugas pimpinan dalam pengawasan merupakan komponen yang diperlukan dari seluruh kegiatan organisasi. Kemampuan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sangat diperlukan agar pelaksanaan pengawasan dapat berhasil.

Pengertian Kinerja

Kinerja tingkat tinggi seseorang karyawan harus mau melakukan pekerjaan dengan baik (motivasi) harus mampu melakukan pekerjaan dengan baik (kemampuan), dan harus mempunyai materi, sumberdaya, perlengkapan, dan informasi untuk melakukan pekerjaan tersebut (lingkungan) defenisi dalam salah satu area ini akan menurunkan kinerja oleh karna itu seseorang harus lebih tinggi semangat dalam berjuar untuk memastikan bahwa diketiga posisi tersebut tercukupi (Moorhead Dan Griffin, 2013:87).

Dari defenisi tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja merupakan salah satu bentuk kejayaan seseorang individu untuk ingin mencapai perannya atau target yang berasal dari perilaku tersendiri. Kinerja seseorang dikatan baik apabila hasil yang dilalui sangat baik apa bila hasil kinerja individu dapat mencapai target yang dilakukan sebelumnya.

Sedangkan Menurut (Moehariono, 2012:96), pengukuran kinerja mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang peningkatang mengenai pekerjaan terhadap arah maupun sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk informasi atas efisiensi dan efektivitas reaksi dalam mencapai tujuan suatu lembaga.

Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kinerja merupakan hasil yang ingin dicapai dalam pekerjaan tersebut sesuai dengan kriteria tertentu yang masih berlaku untuk pekerjaan tersebut.

Pengertian Evaluasi

Evaluasi sangat perlu dilakukan untuk dapat menentukan nilai atau hasil yang dilakukan seseorang dengan program program yang telah berjalan untuk mengukur hasil kondisi pelaksanaannya dan menyelidiki apakah program yang dilakukan sesuai dengan apa yang ingin dicapai maka dari itu posisi untuk menghentikan atau memperbaiki penyelidikan yang diperlukan tersebut dinamakan evaluasi (Irene, 2016:10).

Pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan nilai kebijakan dimana pada posisi dimana pada kenyataan mempunyai nilai dari hasil tujuan dan sasaran kebijakan. Akhir suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja membantu ketua untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, suatu yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan, bermamfaat bagi pelayanan publik.

Sedangkan evaluasi menurut Tayibnapi (Mesione, 2017) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan sampai mana arah pendidikan dapat dicapai.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang sudah ada. Penilaian dilakukan secara obyektif dan berdasarkan criteria yang sudah ada sesuai perencanaan dari kegiatan tersebut dapat dilihat hasil yang diraih sudah sesuai target maupun standar yang telah ditentukan atau belum sudah dilakukan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan hasilnya dapat untuk menentukan jalan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan.

Definisi Pemerintah Badan eksekutif pemerintah, yang terdiri dari walikota, gubernur, bupati, dan presiden, disebut jika istilah "pemerintah" digunakan dalam arti sempit. Sedangkan istilah "pemerintah" secara luas mengacu pada lembaga eksekutif, legislatif (parlemen), dan yudikatif (lembaga hukum).

Pemerintah Disperindag Perindustrian dan Perdagangan, disebut juga sebagai Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Pendistribusian Tabung Gas LPG 3 Kg dan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/542/56/HUK tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg Tingkat Kabupaten Polewali Mandar.

Pengertian Gas LPG

LPG adalah bahan bakar cair tidak berwarna dan tidak berbau yang menyebar perlahan di udara untuk mendeteksi kebocoran. Mercaptane, komponen tertentu dari gas LPG, telah ditambahkan oleh Pertamina. Salah satu anggota keluarga yang dituntut cepat tanggap terhadap kebocoran pada peralatan LPG dapat segera mendeteksi bau yang khas dan menyengat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu mengacu pada pendapat (Moleong 2014:127) Pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dengan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretensi. Dalam tehnik pengumpulan data penulis melakukan observasi, wawancara dan dukumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori supervisi digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pengawasan langsung dan tidak langsung merupakan dua unsur yang membentuk jenis pengawasan, di sini, pengawasan langsung digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek dan menggunakannya sebagai patokan untuk apa yang

kemudian ditemukan di lapangan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut dan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa teknik pengawasan langsung yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum dioptimalkan dengan baik karena minimnya informasi yang diperoleh di lapangan. Pengawasan tidak langsung mengacu pada praktik pelaksanaan pengawasan jarak jauh melalui laporan tertulis atau lisan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah anggaran yang berdampak terbatas merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya pengawasan tidak langsung berdasarkan data dan temuan peneliti dari wawancara tersebut di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan masih perlu ditingkatkan, terbukti dengan lemahnya pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 kg dan kurangnya pengawasan terhadap pendistribusian tersebut.

Meski keputusan Disperindag untuk menghentikan distribusi gas elpiji merupakan keputusan yang baik, ada dua pertimbangan penting. Sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya kerjasama masyarakat, dan rendahnya pengetahuan masyarakat menjadi beberapa faktor yang tidak mendukung. Menurut kesimpulan penelitian, memiliki sumber daya manusia yang cukup dan koordinasi yang baik merupakan elemen penting. Mereka juga merekomendasikan agar sub-agen tersebar secara merata di semua desa, bahwa sumber daya manusia ditingkatkan, bahwa pemantauan terus menerus dilakukan secara teratur, bahwa sub-agen dan masyarakat diberi penghargaan, dan bahwa peringatan keras diberikan ketika terjadi pelanggaran.

4. SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar:

Dinas Perindustrian dan Perindustrian secara umum belum secara efektif melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg di tingkat basis atau sub-distributor di Kabupaten Polewali Mandar, dan hal tersebut masih terjadi hingga saat ini. Kekurangan yang ada dalam proses pengawasannya. Hal ini dapat dilihat dari proses pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut

Pada indikator di atas mengenai proses pengawasan langsung dan penetapan standar sudah sesuai dengan beberapa mekanisme yang dilakukan, namun belum optimal atau belum menyeluruh karena masih ada yang masih menggunakan tabung gas elpiji 3 kg seperti di atas. dan dengan pedagang yang berpenghasilan tinggi. dan Harga Eceran Tertinggi terkadang masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Anggaran untuk pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat kecil, dan juga belum

ada saksi resmi dari kecamatan mengenai pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar. Inilah faktor-faktor yang menghambat penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar. Aspek pendukung pengawasan adalah harus ada cukup orang untuk mengawasi elpiji 3 kg, namun pemerintah telah mengatur secara ketat jumlah orang yang dapat diawasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Y. (2019). Perekonomian Nasional Dalam Presfektif Undang Undang Dasar 1945 Negara Reublik Indonesia. *Celebes Equilibrium Journal*, 1 (1), 26-31.
- Handoko, H.T. (2016:25). *Manajemen: Edisi 2 BPFE*, Yogyakarta.
- Irene Tivani, "Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja".(Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 10.
- Mesione, "Dalam Tinjauan Evaluasi Program". *Educators* (Desember 2017) Vol. 4 No. 2,4.
- Moeheriono, (2012:96). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. *Jakarta:Raja Grafindo Persada*
- Moorhead Dan Griffin, (2013:87). *Perilaku Organisasi. Jakarta:Selemba Empat.*
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*, 1-127.
- Sudi, A. (2021). SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PEGAWAI STUDI KASUS KANTOR DINAS PERINDAG POLMAN. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6 no. (2), 104-1115.
- Suman, A. (2019). *Ekonomi Lokal Pemberdayaan Dan Kolaborasi*. Malang: Ub Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.